

UCAPAN TERIMA KASIH

Dokumen ini dihasilkan melalui dukungan dana dari Uni Eropa. Isi laporan ini merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Telapak/EIA dan dalam kondisi apa pun tidak dapat dianggap sebagai cerminan posisi Uni Eropa.

Telapak/EIA mengucapkan terima kasih kepada Program Perdagangan dan Tata Kelola Hutan, Departemen Pembangunan Internasional, Kerajaan Inggris atas dukungannya pada kegiatan kami.

Laporan ini menggunakan software khusus dari i2 Group. www.i2group.com

Desain Laporan oleh:
www.designsolutions.me.uk

Agustus 2010

ISBN: 0-9540768-9-3



ENVIRONMENTAL INVESTIGATION AGENCY (EIA)

62/63 Upper Street, London N1 0NY, UK
Tel: +44 (0) 20 7354 7960
Fax: +44 (0) 20 7354 7961
email: ukinfo@eia-international.org

www.eia-international.org



TELAPAK

Gedung Alumni IPB,
Jl. Pajajaran No. 54, Bogor 16143,
INDONESIA
Tel: +62 251 8393 245
Fax: +62 251 8393 246

www.telapak.org

SAMPUL DEPAN:

Desain oleh www.designsolutions.me.uk

DAFTAR ISI

- 1 PENDAHULUAN
- 2 UPAYA MELAWAN PEMBALAKAN LIAR DI INDONESIA
- 6 KASUS MAKASSAR
- 9 SINDIKAT KAYU SURABAYA
- 11 PASAR KAYU MERBAU
- 13 REKOMENDASI

PERISTILAHAN

Istilah Papua dalam laporan ini dipergunakan untuk menjelaskan wilayah Indonesia yang berada di Pulau Nugini. Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat mengacu pada dua provinsi yang membentuk Papua.





PENDAHULUAN

© EIA/Telapak

Lima tahun yang lalu, Telapak/EIA telah meluncurkan sebuah laporan berjudul *The Last Frontier* yang mengungkap penyelundupan besar-besaran kayu bulat merbau dari Papua (Indonesia) ke China. Skala penyelundupannya amat mencengangkan, dengan kapal-kapal kargo mengangkut sekitar 300.000 meter kubik kayu bulat merbau per bulannya untuk memenuhi permintaan industri pengolahan kayu di China. Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono merespon laporan tersebut dengan meluncurkan operasi besar-besaran untuk memberantas pembalakan liar yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Aksi tegas ini menjadi sebuah titik balik atas upaya Indonesia dalam melawan pembalakan liar. Sejak itu tingkat pembalakan liar di Indonesia menurun tajam dan aliran penyelundupan kayu ilegal ke luar negeri menjadi berkurang. Selain meningkatkan upaya penegakan hukum, pemerintah Indonesia juga semakin giat pada tataran kebijakan; pemerintah memandatkan sebuah sistem baru verifikasi kayu legal dan menegosiasikan sebuah kesepakatan perdagangan kayu legal dengan Uni Eropa. Masyarakat internasional juga telah bergerak untuk mengurangi perdagangan kayu curian, yang diperkirakan telah merugikan negara berkembang sebesar 15 milyar dolar AS per tahunnya. Pada tahun 2008, pemerintah Amerika Serikat telah meng-amandemen peraturan Lacey Act, yang dapat mempidanakan kegiatan impor ataupun memperdagangkan kayu ilegal. Sedangkan pada bulan Juni 2010, Uni Eropa menyepakati regulasi baru tentang pelarangan impor kayu curian.

Meskipun telah terjadi kemajuan yang substansial, namun pembalakan liar di Indonesia masih berlanjut dan mengancam hutan-hutan Indonesia yang amat berharga. Pada bulan April 2010 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengekspresikan kekecewaannya terhadap minimnya perkembangan dalam proses pidana kasus pembalakan liar dan menginstruksikan Satgas Pemberantasan Mafia Peradilan untuk melakukan penyelidikan.

Seruan perpanjangan upaya melawan pembalakan liar dari Presiden ini sudah tepat. Investigasi Telapak/EIA terhadap

penyelundupan kayu merbau yang tertuang dalam laporan ini menunjukkan kehebatan sebuah sindikat kriminal yang mampu menghindari pemeriksaan dengan dukungan pejabat pemerintah yang korup.

Sepanjang tahun 2009 dan 2010 Telapak/EIA melaksanakan investigasi rahasia terhadap perdagangan ilegal kayu merbau di China dan Singapura, serta di Surabaya, Makassar dan Papua (Indonesia). Kegiatan-kegiatan investigasi ini telah mengungkapkan betapa signifikannya jumlah merbau ilegal, dalam bentuk kayu balok dan kayu gergajian kasar, yang terus diselundupkan keluar Indonesia, sebagian besar dikirim ke China. Para investigator juga mengungkapkan aktifitas ilegal dari dua pedagang gelap kayu, yaitu Hengki Gosal, orang dibalik pengiriman 23 kontainer kayu bulat merbau yang berhasil digagalkan, dan Ricky Gunawan, lelaki asal Surabaya yang sering menyelundupkan kayu.

Telapak/EIA mengakui kemajuan dalam upaya pemberantasan pembalakan liar di Indonesia, namun tetap meyakini dibutuhkan tindakan yang lebih keras untuk mengatasi para penjahat kayu. Hingga tahun 2005 pemerintah Indonesia memperkirakan bahwa pembalakan liar telah merugikan negara sebesar 2 milyar dolar per tahun – sebuah kejahatan lingkungan yang sangat besar. Namun, sangat disayangkan proses peradilan terhadap kasus pembalakan liar tersebut masih belum memadai.

Telapak/EIA menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk menyelidiki kasus-kasus yang secara detil disebutkan dalam laporan ini, dan menghambat perdagangan ilegal kayu merbau dengan memasukkannya ke dalam daftar CITES (Convention on International Trade in Endangered Species). Pemerintah Indonesia juga perlu memastikan bahwa sistem legalitas kayu yang baru telah cukup kuat untuk menjamin pemantauan yang efektif. Sekarang adalah saatnya meningkatkan kampanye melawan pembalakan liar.

ATAS:

Pengapalan kayu bulat merbau dari Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, April 2003.

Telapak/EIA, Agustus 2010



UPAYA MELAWAN PEMBALAKAN LIAR DI INDONESIA

© EIM/Telapak

ATAS:

Kayu-kayu bulat yang telah disita pada tahun 2005 di daerah dekat Jayapura. Kayu sitaan tersebut dijaga oleh tentara sebelum dipalkan ke Surabaya, Juni 2007.

Pada pertengahan bulan Oktober 2009 petugas bea cukai di pelabuhan Tanjung Priok, sebelah utara ibukota Indonesia DKI Jakarta, membuat penemuan yang mencengangkan. Saat sedang menjalankan pemeriksaan rutin pada kontainer-kontainer yang disebut “truck flooring”, seorang petugas menaruh kecurigaan pada berat sebuah kontainer yang tidak wajar. Dalam pemeriksaan lebih dekat, ditemukan sejumlah kayu bulat merbau, jenis kayu yang berharga, di dalam kontainer tersebut. Penemuan tersebut mendorong dilakukannya pemeriksaan menyeluruh dengan Sinar X terhadap 23 kontainer yang tiba dalam satu pengiriman dari pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan. Tujuan ekspor pengiriman ini adalah China, India dan Korea Selatan. Di dalam kontainer-kontainer itu secara total ditemukan 120 kayu bulat merbau seberat 400 ton.

Usaha yang berani untuk menghindari larangan ekspor kayu bulat dari Indonesia ini telah mengindikasikan bahwa perlawanan terhadap pembalakan liar dan penyelundupan kayu masih harus terus diperjuangkan. Hal ini juga menunjukkan kelemahan serius dalam implementasi regulasi kehutanan dan aturan lisensi kayu tetap terjadi, dengan korupsi sebagai salah satu faktor kuncinya.

Kayu merbau ditebang di Papua, Indonesia bagian timur dan dikapalkan ke Makassar; ijin pengangkutan seharusnya memungkinkan penelusuran asal-usul kayu tersebut sejak dari hutan sampai ke pabrik. Begitu dimuat dalam kontainer, “truck flooring” ini seharusnya secara fisik sudah diperiksa oleh surveyor independen yang ditunjuk pemerintah, setelah itu baru ijin ekspor diberikan. Ke-23 kontainer berisi kayu bulat merbau ilegal tersebut telah mendapatkan dokumen ekspor yang dibutuhkan dari Makassar. Jika bukan karena kejelikan petugas bea cukai di Jakarta, maka kayu-kayu tersebut pasti sudah dikapalkan ke luar negeri. Jelas, telah terjadi sebuah kegagalan dalam sistem pemberantasan penyelundupan kayu.

Investigasi yang dilakukan Telapak/EIA pada kasus Makassar serta kasus penangkapan merbau lainnya selama beberapa tahun terakhir ini memperjelas kegiatan-kegiatan sekelompok penyelundup kayu yang memanfaatkan berbagai cara untuk menghindari pemeriksaan, dan sering kali melalui bantuan oknum pegawai pemerintah.

Lima tahun telah berlalu sejak pengungkapan pembalakan liar dan penyelundupan kayu merbau besar-besaran di Papua yang mendorong dilakukannya sebuah operasi melawan pembalakan liar oleh Presiden Indonesia SBY. Pada bulan Februari 2005, Telapak/EIA telah meluncurkan laporan “The Last Frontier”, yang menunjukkan bagaimana penyelundupan kayu bulat merbau keluar dari Papua menuju China sebesar 300.000 meter kubik setiap bulannya.⁽¹⁾ Sebulan kemudian sebuah satuan tugas beranggotakan lebih dari 1.500 penegak hukum diberangkatkan ke Papua dalam Operasi Hutan Lestari II (OHL II), dan aliran merbau ilegal berhasil dibendung.

Menjelang akhir operasi pada bulan Mei 2005, lebih dari 400.000 meter kubik kayu telah berhasil ditahan, dan kapal, tongkang dan kendaraan pengangkut kayu disita. Efek operasi ini segera terasa dalam perdagangan kayu global dengan harga kayu bulat merbau naik dua kali lipat di pasar Shanghai. Keseluruhannya, sejumlah 186 tersangka telah diidentifikasi oleh polisi.⁽²⁾

Operasi ini menandakan titik balik yang tegas bagi perjuangan Indonesia untuk melawan pembalakan liar. Dalam pertengahan pertama dekade sebelumnya, hutan negara telah dirampok oleh pembalakan liar, dengan tingkat pembalakan liar sebesar 80 persen, salah satu yang terburuk di dunia. Saat ini pembalakan liar telah merugikan negara sebesar 2 milyar dolar per tahun dari hilangnya sumber daya alam dan sebaliknya menguntungkan para bos kayu yang menguasai sindikat kejahatan yang berada di balik pembalakan liar.⁽³⁾

Menjelang tahun 2009, tingkat pembalakan liar di Indonesia diperkirakan turun setengahnya menjadi 40 persen.⁽⁴⁾ Investigasi lapangan Telapak/EIA menemukan penurunan yang signifikan pada volume kayu ilegal dari Indonesia menuju China dan Malaysia, sementara pada pedagang kayu di negara-negara tersebut menyebabkan meningkatnya penegakan hukum di Indonesia. Tindakan tegas pemerintah ini juga telah mendorong beralihnya usaha para bos kayu ke jenis usaha yang beresiko lebih kecil. Abdul Rasyid, orang di balik praktek pembalakan liar di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah telah beralih ke usaha kelapa sawit. Sementara itu Heng Ijat Hong yang terlibat dalam penyelundupan merbau di Papua, beralih ke penambangan batu bara di Kalimantan.

Indonesia juga telah secara aktif membangun dukungan di tingkat internasional untuk memberantas pembalakan liar. Indonesia juga telah memasuki tahap akhir negosiasi dengan Uni Eropa tentang Kesepakatan Kemitraan Sukarela (Voluntary Partnership Agreement atau VPA), dimana hanya kayu yang telah diverifikasi legal dari Indonesia yang diijinkan masuk ke pasar Uni Eropa. Salah satu elemen kunci dari VPA adalah sistem jaminan legalitas kayu, dan pada tahun 2009 Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan sebuah peraturan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Regulasi tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan. Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia terlibat dalam menghasilkan sebuah resolusi dalam Komisi PBB untuk Pencegahan dan Peradilan terhadap Tindak Kejahatan yang mendorong kerjasama internasional pemberantasan perdagangan lintas-batas atas hasil hutan. Pada tahun 2010 Indonesia dan Norwegia menandatangani sebuah kesepakatan senilai satu milyar dolar untuk penurunan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan. Dalam kesepakatan ini, Indonesia akan membentuk unit khusus untuk memberantas pembalakan liar.⁽⁵⁾

Pembalakan liar di negara ini masih saja belum bisa diberantas. Penegakan hukum di lapangan yang lebih efektif telah gagal diterjemahkan dalam tindakan yang nyata untuk melawan para pelanggar hukum, terutama para bos kayu, penyokong dana dan pegawai pemerintah yang korup. Dari 186 tersangka pembalakan liar berdasarkan hasil OHL II, hanya 8 kasus yang akhirnya diputuskan oleh pengadilan. Analisis dari 205 kasus pembalakan liar antara tahun 2005-2008 menunjukkan bahwa 137 tersangka telah dibebaskan oleh pengadilan, dan hanya 10 kasus yang menghasilkan hukuman penjara selama 2 tahun atau lebih. Angka-angka ini juga menggambarkan kegagalan pemerintah untuk membekuk pelaku papan atas. Dari 205 kasus hanya 49 orang yang teridentifikasi sebagai bos kayu, penyokong dana, dan pegawai korup, sementara sisanya menargetkan pihak-pihak dengan posisi yang lebih rendah dalam rantai pembalakan, seperti operator chainsaw, dan sopir truk.⁽⁶⁾

Kegagalan membongkar sindikat kuat pembalakan liar ini mendapat kritikan dari Presiden SBY. Pada bulan April 2010, Presiden menyerukan dilakukannya usaha yang lebih besar untuk melawan pembalakan liar dengan mengatakan: "Saya mengingatkan kembali, pemberantasan illegal logging jangan kendor. Jangan kendor. Segera turun kembali, kepolisian, penegak hukum, TNI, para Gubernur, Bupati, dan Walikota harus sangat serius untuk melanjutkan pemberantasan illegal logging ini. Jangan berkompromi, jangan lunak, jangan permisif terhadap kejahatan illegal logging ini."⁽⁷⁾

Presiden juga menyoroti kinerja buruk sistem peradilan dalam menangani kasus pembalakan liar dan menugaskan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, yang dibentuk awal tahun 2010, untuk memeriksa keputusan pengadilan yang mencurigakan dalam kasus pembalakan liar. Presiden mengumumkan: "Saya percaya mafia berada di belakang aktifitas pembalakan liar. Saya

BELOW:

Pembalakan liar mengumpulkan balok-balok merbau untuk diangkut ke penggergajian, dekat Jayapura, Provinsi Papua, September 2009.



© EIA/Telapak



ATAS:
Konversi hutan ilegal, Papua Barat,
April 2009. 25 persen hutan Papua
telah musnah sejak akhir tahun
1990-an.

menugaskan satgas pemberantasan mafia hukum untuk menyelesaikan masalah ini, mengurangi dan mengakhiri aktifitas-aktifitas ini.”⁽⁸⁾

Masih harus dilihat seberapa efektif pemeriksaan sistem peradilan akan berjalan. Korupsi sistematis masih terjadi dalam tubuh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Tindakan yang efektif melawan pembalakan liar juga terhambat oleh kurangnya kerjasama antar berbagai instansi penegak hukum, meskipun telah ada Instruksi Presiden tahun 2005 yang memastikan kerjasama antar 18 instansi pemerintah untuk melawan kejahatan hutan.⁽⁹⁾

TEKANAN ATAS HUTAN PAPUA

Situasi di dua provinsi paling timur Indonesia, Papua Barat dan Papua, telah menjadi tantangan tersendiri dalam pemberantasan pembalakan liar di Indonesia. Hutan Papua yang unik membentuk wilayah terakhir dari hutan tropis di seluruh kawasan Asia-Pasifik, dan merupakan hutan tropis terluas ketiga di dunia, setelah Amazon dan Kongo. Dengan demikian, keberadaan hutan Papua menjadi signifikan bagi dunia.

Hutan Papua menjadi wilayah penyebaran yang luar biasa bagi keunikan keanekaragaman hayati, sekitar 60 persen dari jenis yang ditemukan di Indonesia; dalam tahun-tahun terakhir hutan Papua telah disebut sebagai ”taman surga (Garden of Eden)” setelah tim eksplorasi internasional menemukan sejumlah spesies baru bagi ilmu pengetahuan dan dunia.⁽¹⁰⁾

Hutan ini juga didiami oleh lebih dari 250 suku-suku yang berbeda, yang merupakan masyarakat paling beragam dari segi budaya dan bahasa di dunia. Kelompok masyarakat ini telah mengelola hutan-hutan Papua secara turun temurun, terutama karena kehidupan sehari-harinya tidak dapat dipisahkan dari sumberdaya hutan. Hutan-

hutan Papua juga menyimpan ratusan juta ton karbon.

Fakta bahwa Papua memiliki seluruh pohon merbau yang ada di Indonesia menjadikannya sebagai target utama operasi pembalakan liar. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan belum lama ini membenarkan bahwa pembalakan liar skala besar di Indonesia terkonsentrasi di Papua.⁽¹¹⁾ Seorang pegawai senior di Kementerian Kehutanan mengakui terjadinya kerusakan parah pada hutan Papua karena pembalakan liar dan eksploitasi hutan untuk perkebunan. Ia menyatakan bahwa seperempat dari hutan Papua telah hilang sejak akhir 1990-an, dengan penurunan luas hutan dari 32 juta hektar menjadi 23 juta hektar.⁽¹²⁾

Pengelolaan hutan Papua sangatlah kacau dan tidak transparan. Dari hasil OHL II, banyak wilayah HPH dilaporkan tidak aktif lagi. Namun, dalam beberapa tahun dijumpai adanya indikasi kegiatan pembalakan mulai meningkat lagi, seiring dengan terjadinya konsolidasi beberapa pemegang konsesi terbesar dan datangnya investor baru.

Sebagai contoh, pada bulan Agustus 2008 CCT Resources Holdings Limited (CCT), sebuah perusahaan yang terdaftar di Pulau Cayman tetapi beroperasi di luar Hongkong, telah membeli 313.500 hektar konsesi hutan di pedalaman Mimika, kabupaten di wilayah pesisir selatan provinsi Papua. Harga yang dibayarkan setara dengan hanya 320 dolar per hektar, dengan stok kayu di dalamnya seharga sekitar 148 juta dolar.⁽¹³⁾

Investor lain adalah Robert Joppy Kardinal, seorang anggota DPR. Dia dilaporkan memiliki saham pada perusahaan HPH Wana Irian Perkasa di provinsi Papua Barat. Tahun 2005 Kardinal disebut dalam surat kabar karena terkait dengan pembalakan liar, namun tidak pernah diselidiki.⁽¹⁴⁾ Investigasi lapangan terakhir menemukan keluhan masyarakat lokal terhadap Wana

Irian Perkasa karena mengabaikan hak-hak atas tanah mereka dan beroperasi tanpa ijin resmi.⁽¹⁵⁾

Sebuah HPH dengan wilayah konsesi utuh terbesar di Papua seluas 670.000 hektar, dijalankan oleh Mamberamo Alasmandiri. Operasi HPH ini telah mendapat verifikasi legalitas dari perusahaan auditor dari Swiss, yaitu SGS. Pada bulan Nopember 2009 Yorris Raweyai, seorang anggota DPR, menyerukan dilakukannya investigasi terhadap tuduhan pembalakan liar dan penyelundupan kayu yang melibatkan konsesi Mamberamo Alasmandiri.⁽¹⁶⁾ Masyarakat lokal juga mengeluhkan terjadinya pembalakan liar secara luas oleh perusahaan Sinar Wijaya Plywood Industry (SWPI), termasuk pembalakan di luar area konsesi.⁽¹⁷⁾ SWPI adalah perusahaan penghasil plywood yang memiliki 10 persen saham Mamberamo Alasmandiri dan memperoleh bahan baku kayu dari konsesi tersebut. Pada bulan Juni 2010 polisi Papua telah menahan 4.500 meter kubik kayu bulat di areal SWPI. Pihak kepolisian mengatakan bahwa kayu-kayu bulat tersebut tidak memiliki ijin, dan menambahkan bahwa SWPI telah melakukan pembalakan liar di wilayah Mamberamo sejak lama.⁽¹⁸⁾

Bukti lebih lanjut tentang meluasnya ilegalitas pada sektor pembalakan di Papua ditunjukkan oleh serangkaian penahanan kayu belum lama ini. Pada bulan Mei 2010, Kepolisian Sorong, Papua Barat menyita 4.200 meter kubik kayu bulat merbau dari perusahaan HPH Hasrat Wira Mandiri. Pada Juni 2010 lebih dari 5.000 meter kubik kayu bulat disita oleh kepolisian di daerah Bintuni, Papua Barat, termasuk 2.000 meter kubik kayu bulat merbau. Dalam kedua kasus tersebut kayu yang disita tidak memiliki ijin resmi.⁽¹⁹⁾

Pengelolaan hutan dan usaha melawan pembalakan liar di Papua dipersulit dengan ketidakjelasan kerangka hukum. Pada bulan September 2007 gubernur provinsi Papua Barat dan Papua mengeluarkan instruksi pengawasan pengangkutan kayu dari daerah tersebut ke wilayah lain di Indonesia dalam upaya memberantas pembalakan liar dan mengundang investasi ke sektor pengolahan kayu. Dalam instruksi dinyatakan bahwa sejak awal 2008 tidak ada pengangkutan kayu bulat dari Papua yang akan diijinkan, sementara pengawasan bertahap akan dilakukan di provinsi Papua Barat, dengan 50 persen kayu bulat masih diijinkan untuk dikapalkan pada tahun 2009 dan pelarangan total di tahun 2012.⁽²⁰⁾

Namun, riset dari Telapak/EIA mengindikasikan bahwa pengawasan ini sering kali diabaikan, dengan banyaknya pengangkutan kayu bulat dari Papua menuju provinsi Papua Barat dan kemudian menuju poros pengolahan utama di Pulau Jawa dan Sulawesi. Dokumen resmi menunjukkan bahwa pejabat kehutanan telah mengeluarkan ijin untuk mengangkut 164.500 meter kubik kayu bulat dari Papua

menuju Papua Barat antara bulan Juni 2009 dan Juni 2010, dimana 101.000 meter kubik di antaranya terdiri atas kayu bulat merbau.⁽²¹⁾

Tidaklah mengejutkan bahwa pengawasan pengangkutan kayu bulat ini tidak diterapkan, karena industri kayu di daerah lain di Indonesia amat mengandalkan hutan Papua sebagai sumber bahan baku, terutama jenis merbau. Hal ini ditunjukkan oleh dokumen RPPBI (Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri), dimana seluruh sawmill dengan kapasitas di atas 6.000 meter kubik per tahun harus menunjukkan darimana asal bahan baku kayunya kepada Kementerian Kehutanan. Pada tahun 2008 sawmill di luar Papua berencana memperoleh 311.000 meter kubik kayu bulat dari provinsi Papua dan Papua Barat, meskipun pengawasan pengangkutan kayu bulat telah diberlakukan.

BELOW:

Kayu bulat merbau ilegal di Seremuk, Sorong Selatan, Papua Barat, 2003



© EIA/Telapak

MERBAU

Merbau adalah jenis kayu keras berwarna gelap dan bernilai tinggi. Kayu ini digunakan untuk produk-produk lantai kayu, dek, mebel luar ruangan, pintu dan kusen jendela. Kayu bulat merbau di Papua dijual dengan harga antara \$250 dan \$300 per meter kubik. Merbau merupakan target utama para pembalakan liar dan penyelundup kayu karena tingginya permintaan bahan baku kayu dari China dan India, serta produk-produk dari kayu merbau di Australia, Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Permintaan ini juga mendorong eksploitasi merbau yang berlebihan di Papua. Analisis terhadap data resmi menunjukkan bahwa jumlah ekspor merbau di tahun 2008 mencapai 192.000 meter kubik dari total ekspor produk-produk kayu yang sebesar 725.000 meter kubik. Secara keseluruhan ekspor produk merbau mencapai lebih dari 30 persen ekspor produk kayu gergajian dari Indonesia (tidak termasuk panel, veneers, pulp dan kertas). Antara tahun 2003-2007 volume ekspor merbau yang tercatat meningkat tiga kali lipat.⁽²²⁾

Di tahun 2005 Kementerian Kehutanan Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah untuk mencantumkan merbau ke dalam Apendiks III CITES. Langkah seperti itu akan memaksa negara lain untuk menahan pengiriman merbau ilegal asal Indonesia. Sayangnya kementerian kehutanan kemudian gagal mencantumkan hal tersebut.

Di luar Papua, poros pengolahan merbau yang utama adalah Surabaya (Jawa Timur) dan Makassar (Sulawesi Selatan).



KASUS MAKASSAR

© EIA/Telepak

ATAS:

Kayu bulat merbau di Rajawali Makmur Sejahtera, Makassar, Sulawesi Selatan, Mei 2010.

Kota pelabuhan Makassar adalah pusat utama perdagangan dan pengolahan kayu merbau. Dalam sejarahnya, banyak konstruksi rumah di Makassar menggunakan kayu merbau, yang dahulu mudah dijumpai di hutan Sulawesi. Dewasa ini, nyaris tidak ada lagi merbau yang tersisa di Sulawesi, namun industri pengolahan merbau yang berorientasi ekspor tumbuh secara signifikan dan mengandalkan pasokan dari Papua.

Peran Makassar dalam perdagangan ilegal kayu merbau mulai terlihat jelas dengan ditangkapnya 23 kontainer berisi kayu bulat merbau di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada bulan Oktober 2009. Pengiriman tersebut ditangkap oleh petugas bea cukai karena melanggar aturan tentang larangan ekspor kayu bulat dari Indonesia. Pengiriman ilegal tersebut terdiri atas 10 kontainer berukuran 40 kaki dan 13 kontainer berukuran 20 kaki. Di dalam kontainer tersebut ditemukan 120 potong kayu bulat merbau dengan total volume 350 meter kubik. Kayu-kayu ilegal ini bernilai 100.000 dolar, berdasarkan harga merbau di Papua. Jika didasarkan pada harga di pasar internasional, maka nilainya bisa mencapai lebih dari dua kali lipat.

Dokumen pengiriman menunjukkan bahwa kontainer-kontainer tersebut dikirim dari Makassar pada tanggal 29 September, dengan tujuan 3 perusahaan di 3 negara yang berbeda yaitu Jiangsu Skyrun International Group di China, Sri Balaji Logs Products di India, dan Vary Timber di Korea Selatan. Pengiriman ini dilakukan melalui Jakarta agar terhubung dengan rute internasional. Isi dari kontainer dideskripsikan sebagai "truck flooring tongue and groove". Menurut aturan pelarangan ekspor kayu gergajian dari Indonesia, produk kayu setengah jadi masih

diperbolehkan untuk diekspor, tetapi harus melalui pemeriksaan fisik dari surveyor independen yang ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan.⁽²³⁾ Perusahaan surveyor tersebut adalah Sucofindo, 95 persen sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Sucofindo memiliki kontrak eksklusif untuk melakukan pekerjaan ini.

Selanjutnya perusahaan pengeksportir harus terdaftar di Kementerian Perdagangan sesuai skema ETPIK (Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan), dan memiliki surat pengesahan untuk setiap pengiriman yang dikeluarkan oleh Badan Revitalisasi Industri Kayu (BRIK). Dalam kasus ini, sang eksportir, yaitu perusahaan Menara Mas dari Makassar, telah mengantongi ijin yang dibutuhkan.⁽²⁴⁾

Setelah menerima surat-surat yang diperlukan, kontainer-kontainer tersebut meninggalkan Makassar menuju Jakarta. Para penyelundup merasa percaya diri bahwa transit ke tujuan akhir akan berjalan mulus karena surat pengesahan dari Sucofindo dan BRIK telah didapat. Namun, intervensi dari petugas bea cukai yang waspada di Jakarta berhasil menggagalkan rencana ini dan mendorong penyelidikan selama enam bulan atas upaya penipuan.

Penyelidikan awal difokuskan pada pelanggaran peraturan kepabeanan, dan dilakukan oleh petugas bea cukai baik dari Jakarta maupun dari Makassar. Dalam penyelidikan, terungkap bahwa kayu bulat merbau dibeli oleh eksportir Menara Mas dari perusahaan Rajawali Makmur Sejahtera, sebuah perusahaan besar pengolahan kayu merbau di Makassar. Pegawai Menara Mas menyuap karyawan Sucofindo untuk memalsukan laporan surveyor dan memberikan segel untuk ke-23 kontainer,

sebagai bukti pemeriksaan telah dilakukan. Lalu BRIK mengeluarkan dokumen ekspor untuk "truck flooring".

Dalam investigasi Telapak/EIA ditemukan bahwa Menara Mas memiliki pelanggan di China, India, Korea Selatan, Australia dan Singapura; nama perusahaan terakhir adalah Soh Timbers Binders. Tiga tersangka telah teridentifikasi ; Abdul Hakim, seorang surveyor di Sucofindo Makassar dan Halim Perdana Kusuma dan M. Arsyad, keduanya adalah karyawan divisi ekspor Menara Mas. Direktur Menara Mas, Hengky Gosal, menyatakan tidak mengetahui tentang pengiriman tersebut karena sedang berada di Singapura saat itu.

Pada bulan Februari sebuah media lokal melaporkan bahwa sidang pengadilan ke-3 terdakwa telah dimulai di Pengadilan Negeri Makassar. Selama persidangan, Arsyad telah dituduh membayar Abdul Hakim sejumlah 20 dolar untuk memalsukan hasil pemeriksaan, dengan janji pembayaran lebih setelahnya.⁽²⁵⁾ Sementara itu pada bulan Juni 2010 telah dilaporkan bahwa Halim Perdana Kusuma divonis hukuman penjara selama 2 tahun.⁽²⁶⁾

Namun, investigasi Telapak/EIA selanjutnya di Makassar menunjukkan adanya konspirasi yang jauh lebih luas, dengan Hengky Gosal sebagai pemain utama.

Pada bulan Mei 2010 investigator Telapak/EIA yang menyamar sebagai pedagang kayu mengunjungi pabrik Rajawali Makmur Sejahtera (RMS) dan bertemu dengan Alex Tungadi, direktur perusahaan tersebut. Fasilitas pengolahan kayu dan penggergajian terpadu yang besar tersebut berada di sebuah daerah industri di pinggiran kota Makassar. Jenis kayu utama yang diolah adalah merbau. Selama pertemuan satu jam, Tungadi menyatakan pada investigator bahwa perusahaannya mendapatkan sebagian besar kayu bulat dari Mamberamo Alasmandiri di Papua. Menurut Tungadi, perusahaan HPH ini adalah satu-satunya konsesi HPH yang bersertifikat di Papua. Dia membayar Rp 3 juta (300 dolar) untuk setiap meter kubik kayu bulat. Dia juga mengatakan bahwa RMS sedang dalam proses untuk memperoleh sertifikasi lacak balak.

Tungadi selanjutnya menjelaskan bagaimana dia kadang membeli kayu bulat merbau sitaan dari pelelangan di Papua. Pada tahun 2007 dia memenangkan lelang di Manokwari, Papua Barat, dan membayar polisi lokal Rp 3 juta per hari untuk menjaga kayu tersebut dari pesaingnya dari Surabaya selama pengangkutan. Selain kayu bulat, Tungadi juga membeli kayu gergajian merbau dari "sumber lokal" di Papua, dan memproses kayu ini menjadi produk lantai kayu untuk pasar China. Selain mengekspor ke China, RMS juga memasok decking merbau ke Australia dan Eropa.

Selama percakapan, Tungadi mengungkapkan bahwa dulu dia mengirim kayu balok merbau ilegal ke China, tetapi telah berhenti tahun lalu karena rencananya untuk mendapatkan sertifikasi bagi RMS. Selama perjalanan di tempat penimbunan kayu perusahaan tersebut, Telapak/EIA menyaksikan sekitar 3.000 meter kubik kayu bulat merbau. Tungadi menjelaskan bahwa kayu-kayu tersebut adalah sisa dari

pengiriman 8.000 meter kubik yang didapat dari Mamberamo Alasmandiri pada bulan Agustus 2009. Tungadi mengatakan sudah menjadi kebiasaan di Makassar untuk membayar "uang pelicin" sekitar 15.000 dolar kepada petugas Kepolisian, Dinas Kehutanan, dan petugas Bea Cukai setempat untuk setiap tongkang berisi kayu bulat yang diangkut dari Papua., meski telah memiliki dokumen yang benar. Tungadi mengatakan bahwa asal kayu bulat yang digunakan RMS bertentangan dengan asal kayu dalam dokumen RPPBI perusahaan, yang menyatakan bahwa pada tahun 2009 kayu bulat dipasok dari konsesi HPH Wanakayu Hasilindo di Kaimana, Papua Barat.

Menyusul kunjungan ke RMS, investigator Telapak/EIA berusaha menemui Hengky Gosal, direktur Menara Mas. Setelah sejumlah percakapan melalui telepon, sekretarisnya mengatakan bahwa Menara Mas berganti nama menjadi Nessa Golden Wood, dan menambahkan bahwa Gosal sering berganti nomer HP dan sulit untuk dihubungi. Akhirnya tercapai sebuah rencana pertemuan di sebuah hotel di pusat kota Makassar.

Di hotel, Gosal menunjukkan kartu namanya atas nama Nessa Golden Wood dan memberitahu investigator Telapak/EIA bahwa pabriknya sedang direnovasi. Saat ini ia menyimpan pasokan kayu bulat merbaunya di pabrik RMS. Ia juga mengungkapkan bahwa Tungadi adalah adiknya. Gosal membuat pernyataan yang bertentangan dengan adiknya tentang kayu bulat yang dilihat investigator Telapak/EIA di RMS. Kayu bulat tersebut adalah miliknya dan dibeli dari seorang pemasok di Biak, Papua 2 bulan sebelumnya. Dia juga mengatakan mendapatkan merbau dari sejumlah konsesi di Sorong, serta Mamberamo Alasmandiri. Ia bepergian ke Papua setiap 3 bulan untuk membeli kayu bulat merbau, dan membayar tentara lokal sebagai pengawalnya selama perjalanan. Gosal menceritakan bagaimana dia dulu pernah menjadi pedagang kayu bulat di Papua.

Gosal mengatakan bahwa bisnis utamanya adalah pengiriman lantai kayu merbau ke

BAWAH:

Hengky Gosal, Direktur UD Menara Mas, mengaku mengirimkan 40-50 kontainer berisi balok kayu merbau ke China setiap bulannya.

PALING BAWAH:

Kantor Sucofindo di Makassar, Sulawesi Selatan. Auditor Sucofindo tidak melakukan inspeksi atas kontainer berisi kayu ilegal setelah menerima suap dari pegawai Hengky Gosal.



© EIA/Telapak, May 2010



© EIA/Telapak

China. Ia mengirimkan sekitar 25 kontainer setiap bulannya, dengan harga 1.250 dolar per meter kubik (termasuk pengapalannya). Dia juga mengungkapkan bagaimana dia dulunya biasa mengirim sejumlah besar balok kayu merbau ilegal ke China. Sekitar 50 kontainer dikirim ke Shanghai tiap bulan dengan harga 850 dolar per meter kubik. Gosal mengatakan bahwa dia menghentikan bisnis ini 6 bulan lalu (waktu yang serupa dengan saat penangkapan 23 kontainer di Jakarta), karena pergantian pimpinan bea cukai di Makassar dan tidak mungkin lagi untuk menyelundupkan kayu merbau ilegal ke China. Dia menambahkan bahwa pimpinan bea cukai tersebut akan diganti 6 bulan lagi, dan dia berharap untuk dapat melanjutkan bisnisnya pada saat itu. Menurut Gosal, kontak-kontak dagangnya mengatakan bahwa pengiriman balok kayu merbau saat ini masih dimungkinkan melalui Surabaya.

Gosal mengatakan: "Dalam ukuran besar kayu merbau dikirim ke China, pernah dilakukan sebelumnya, seperti 6 bulan lalu. Tetapi sekarang, semuanya berhenti. Karena garis merah dari bea cukai. Tidak bisa keluar. Sebelumnya, kita bisa memberikan uang, Anda juga bisa. Ketika pimpinan bea cukai berganti, kemudian orang baru datang, peraturan baru juga akan datang. Sebelumnya, bisa mengirim banyak kayu merbau ke China, 40-50 kontainer per bulan."

Telapak/EIA juga mengunjungi areal industri untuk memastikan alamat resmi kantor Menara Mas dan Nessa Golden Wood, tetapi

tidak menemukan tanda-tanda keberadaan kedua perusahaan tersebut.

Investigasi Telapak/EIA di Makassar menunjukkan bagaimana Hengky Gosal terlibat dalam penyelundupan skala besar balok kayu merbau ilegal ke China. Ia secara jelas berada di balik upaya pengiriman 23 kontainer kayu bulat merbau. Dalam investigasi juga terungkap hubungan antara Gosal dan RMS, yang dijalankan adiknya Tungadi. Hubungan ini terlihat dalam dalam dokumen RPBBi milik RMS; penjualan kayu bulat oleh perusahaan kepada perusahaan pengolah kayu lain melibatkan pembayaran kepada rekening Nessa Golden Wood. Saudara ketiga, Fendy Gosal, terdaftar sebagai kontak di Menara Mas dalam lisensi perusahaan ETPIK.

Kasus 23 kontainer menunjukkan sejumlah kelemahan dalam penegakan hukum. Suap memastikan bahwa pemeriksaan fisik oleh surveyor Sucofindo dan persyaratan BRIK untuk lisensi ETPIK dapat dengan mudah dihindari. Kurangnya kerjasama antara berbagai instansi masih terjadi. Pada bulan November 2009 Kementerian Kehutanan menyurati bea cukai di Jakarta, meminta untuk bergabung dalam investigasi kasus 23 kontainer. Balasan belum diterima sampai bulan Mei 2010, yang berarti bahwa aspek peraturan bea cukai terkait kasus ini dan pelanggaran peraturan kehutanan belum digabungkan. Akhirnya, pejahat sesungguhnya, Hengky Gosal, belum ditindak sementara staff bawahan di Menara Mas dan Sucofindo dengan mudah menjadi kambing hitam.

BAWAH:

Kantor Bea Cukai pelabuhan Tanjung Priok menunjukkan kayu bulat merbau kepada media menyusul penangkapan 23 kontainer UD Menara Mas milik Hengky Gosal, 19 Oktober 2009.





Anonymous

Kota Surabaya di Jawa Timur merupakan pusat utama pengolahan kayu di Indonesia, termasuk kayu merbau. Surabaya juga lokasi pelabuhan Indonesia yang paling sibuk, yaitu Tanjung Perak. Dikarenakan faktor-faktor ini, Surabaya telah menjadi poros utama perdagangan dan penyelundupan kayu merbau.

Sebagian besar pabrik pengolahan kayu di Surabaya bertempat di daerah industri Gresik. Di sini, kayu bulat merbau dari Papua diproses menjadi berbagai produk jadi dan setengah jadi untuk diekspor, terutama bahan untuk lantai kayu dan decking. Meskipun sebagian besar operasi ini legal dan telah mematuhi peraturan pengawasan ekspor kayu bulat dan kayu gergajian Indonesia, namun masih dijumpai aktivitas perdagangan yang menjual kayu merbau ilegal ke pasar internasional, terutama ke China.

Di bulan Juni 2010 saja, petugas di pelabuhan Tanjung Perak berhasil menahan dua pengiriman kayu ilegal, termasuk merbau, untuk tujuan ekspor. Dalam kasus pertama, delapan kontainer berisi merbau, eboni dan meranti ditangkap dalam perjalanan ke Singapura, Taiwan dan China.⁽²⁷⁾ Kasus kedua melibatkan penahanan tujuh kontainer berisi kayu merbau dan jenis kayu lainnya.⁽²⁸⁾

Investigasi Telapak/EIA telah mengungkapkan aktifitas kejahatan yang sedang dilakukan pengusaha Surabaya bernama Ricky Gunawan, salah satu penyelundup kayu merbau yang paling aktif di Surabaya. Bukti-bukti yang dikumpulkan di Surabaya, Singapura, dan Guangzhou serta Xiamen di China sejak 2006 semuanya menunjuk pada peran utama Gunawan dalam perdagangan kayu merbau ilegal. Telapak/EIA telah menyerahkan beberapa laporan tentang Gunawan kepada pihak berwenang Indonesia, namun belum ada penyelidikan atas dirinya. Sampai bulan Desember 2009 dia masih mengirimkan balok-balok merbau ilegal ke China selatan.

Investigator Telapak/EIA pertama kali bertemu dengan Gunawan di bulan Nopember 2006. Dengan menyamar sebagai pembeli kayu, tim investigator bertemu dengan Riki Sumandi, direktur perusahaan Lido di Surabaya, yang sebelumnya mengiklankan

balok merbau untuk dijual ke pasar luar negeri.

Sumandi mengajak tim investigator ke Gresik, dimana akhirnya mereka dikenalkan dengan Ricky Gunawan, mitra bisnis Sumandi yang juga direktur Surabaya Trading.

Gunawan langsung menyombongkan kemampuannya untuk melanggar hukum dan memasok kayu merbau ilegal dengan risiko minim karena koneksi yang dimilikinya. Ia mengklaim mengapalkan sampai 3.000 meter kubik merbau gergajian kering (oleh udara panas) ke China setiap bulannya. Setelah memotong kayu bulat di Gresik, ia menjelaskan bagaimana kayu tersebut dimuat ke dalam kontainer di lima gudang terpisah di daerah tersebut dan dikapalkan ke pelabuhan-pelabuhan China seperti Shanghai, Huangpu, Shenzhen, Guangzhou dan Shantou. Sekitar 50 kontainer dikirim setiap bulannya. Gunawan menangani dua pembeli besar – satu dari Singapura dan satunya lagi dari Hong Kong.

Dalam pertemuan tersebut, Gunawan mengatakan: "Ekspor ini tidak legal. Hari ini mungkin tidak ada masalah. Minggu depan, saya tidak tahu. Saat kargo tiba di China, jangan dibuka di pelabuhan". Ia menambahkan bahwa kadang-kadang ia harus menghentikan pengiriman, ketika koneksinya di bea cukai Tanjung Perak memperingatkannya jika ada pengawasan yang ketat.

Rincian investigasi telah disampaikan kepada Kementerian Kehutanan namun tidak ada tindakan apa-apa.

Nama Gunawan muncul kembali di tahun 2008. Di bulan April tahun 2008 Kementerian Perdagangan Indonesia memberikan "dispensasi" khusus atas larangan ekspor kayu gergajian kepada tiga perusahaan di Surabaya. Dispensasi ini mengizinkan ketiga perusahaan untuk mengekspor "komponen rumah" dari kayu merbau ke China. Ketiga perusahaan ini, yaitu Surabaya Trading, Grafity Merindo dan Trias Hasil Alam Lestari, seluruhnya terkait dengan Gunawan dan mendapatkan ijin untuk mengekspor 70.000 meter kubik merbau atas dasar bahwa "komponen rumah" tersebut ditujukan untuk sebuah proyek



© EIA/Telapak

PALING ATAS:

Petugas bea cukai Surabaya sedang memeriksa kayu merbau dalam sembilan kontainer milik Surabaya Trading menyusul penangkapannya di bulan April 2009.

ATAS:

Ricky Gunawan, seorang penyelundup besar kayu merbau asal Surabaya.

pembangunan di Mongolia. Dikatakan juga bahwa komponen tersebut adalah bagian dari upaya rekonstruksi menyusul gempa bumi yang terjadi di Sichuan.

Sumber di Surabaya menyatakan bahwa pengiriman “komponen rumah” oleh Gunawan tersebut sesungguhnya adalah kayu gergajian kasar merbau, serupa dengan yang dia selundupkan di tahun 2006. Informasi yang berhasil didapat oleh Telapak/EIA di China menunjukkan bahwa pengapalan tersebut tidak ditujukan untuk proyek pembangunan rumah di Mongolia, namun untuk dijual kepada pabrik lantai kayu dan mebel di China.⁽²⁹⁾

Salah satu penadah terbesar merbau yang dikirim Surabaya Trading di tahun 2008 adalah perusahaan Fujian Pan-Chinese Trading, yang berlokasi di propinsi Fujian, China bagian selatan. Selama bulan Mei 2008 Gunawan mengirimkan 40 kontainer berisi “komponen rumah dari kayu merbau” ke perusahaan Fujian Pan-Chinese Trading. Di bulan Juli 2008 investigator dari Telapak/EIA yang menyamar sebagai pembeli kayu menghubungi perusahaan tersebut dan diberitahu bahwa perusahaan tersebut menerima sekitar 200 kontainer kayu merbau per bulannya dari Surabaya, dengan harga 1.100 dolar per meter kubik. Kayu tersebut dijual kepada pabrik-pabrik penghasil lantai kayu, pintu dan tangga kayu di China.

Gunawan muncul kembali di bulan April 2009, ketika petugas bea cukai pelabuhan Tanjung Perak menahan sembilan kontainer berisi kayu merbau yang ditujukan untuk ekspor ke China. Pemilik pengiriman tersebut adalah perusahaan Surabaya Trading milik Gunawan. Pengiriman tersebut diloloskan untuk ekspor oleh perusahaan inspeksi pihak ketiga yaitu Sucofindo karena ditujukan untuk pembangunan jembatan. Dengan demikian maka kayu tersebut dibebaskan dari larangan ekspor kayu gergajian. Namun, dalam pemeriksaannya petugas bea cukai mendapati adanya perbedaan antara penjelasan yang tertera pada dokumen pengiriman dengan kondisi fisik kayu di dalam kontainer yang mengindikasikan ketidaksesuaian dengan deskripsi komponen jembatan.

Investigasi Telapak/EIA mengungkapkan bahwa merbau tersebut tidak pernah ditujukan untuk pembangunan jembatan. Di bulan Mei 2009 investigator Telapak/EIA bertemu dengan Zheng Jianyang, manajer perusahaan Xiamen Sanstar Trading, di kantornya di kota Xiamen, Fujian, China. Dokumen pengiriman menunjukkan bahwa Xiamen Sanstar Trading adalah calon penerima dari kesembilan kontainer yang ditahan di pelabuhan Tanjung Perak.

Dalam pertemuan selama satu jam, Zheng mengklaim bahwa perusahaannya adalah salah satu importir terbesar merbau asal Indonesia di China, termasuk balok kayu

yang dilarang untuk diekspor menurut undang-undang Indonesia. Zheng menyatakan bahwa sumber kayunya berasal dari Surabaya dan Sulawesi, dan ia menjual kayu merbau tersebut ke pabrik penghasil pintu, tangga kayu, jendela dan lantai kayu di seluruh China. Tidak sekali pun ia menyebut-nyebut tentang proyek jembatan, meskipun dia menceritakan bagaimana cetak biru proyek pembangunan palsu digunakan untuk mendapatkan ijin ekspor.

Setelah adanya intervensi dari beberapa pejabat pemerintah dan anggota DPRD yang mewakili Gunawan, dinas bea cukai harus melepaskan kontainer yang ditahan tersebut. Sekali lagi Gunawan berhasil lolos dari investigasi petugas.⁽³⁰⁾

Aktifitas Gunawan dikenal baik oleh para penyelundup. Salah satunya adalah Ng Yit Fooi dari Singapura, pemimpin perusahaan Soh Timber Binders. Telapak/EIA pertama kali bertemu dengan Ng di tahun 2003 ketika sedang melakukan investigasi atas perdagangan kayu ramin yang amat menguntungkan. Dalam pertemuannya dengan investigator Telapak/EIA, Ng memberi tahu bahwa bagaimana ia mengapalkan kayu ramin yang dilindungi dari pulau Sumatra ke China dengan menggunakan surat-surat palsu. Ia juga mengklaim bahwa bisnis utamanya adalah berdagang kayu merbau dari Papua ke China.

Telapak/EIA secara tidak sengaja menemukan nama Ng pada saat mengamati perdagangan kayu merbau di Makassar tahun 2010, di mana terungkap bahwa Soh Timber Binders adalah salah satu pelanggan Menara Mas. Di bulan Mei 2010 investigator Telapak/EIA menemui Ng kembali di pabriknya di Singapura. Ng menjelaskan bahwa bisnis utamanya kini adalah kayu besi (ironwood/belian) dari Malaysia, namun ia masih memperjualbelikan kayu merbau dari Makassar dan Surabaya melalui jaringan agennya. Ia menunjukkan kepada investigator Telapak/EIA sebuah lembar penagihan pengiriman balok merbau ilegal yang ia beli dari Surabaya Trading di bulan Desember 2009 dengan harga 1.150 dolar per meter kubik untuk dikapalkan ke Guangzhou di China. Ketika ditanya tentang Surabaya Trading, Ng langsung menyebut nama Gunawan, seorang “teman” yang digambarkannya sebagai “penyelundup”. Ia mengatakan bahwa alasan ia membeli dari Gunawan adalah karena “Gunawan memiliki jalur untuk lolos dari bea cukai”. Di gudang milik Ng, Telapak/EIA melihat sebagian balok kayu yang dikirim Gunawan.

Selama lima tahun Gunawan telah berhasil menyelundupkan balok-balok kayu merbau keluar dari Surabaya ke China dengan menggunakan berbagai siasat. Bahkan ketika salah satu pengirimannya ditahan, akhirnya dibebaskan juga, yang menunjukkan kekuatan pengaruh koneksinya dan menjelaskan mengapa sampai sekarang ia belum juga ditindak.

BAWAH:

Balok-balok kayu di gudang perusahaan Soh Timber Binders', Singapura, Mei 2010.

PALING BAWAH:

Ng Yit Fooi dari perusahaan Soh Timber Binders', Singapura, Mei 2010. Ng mengimpor balok kayu merbau ilegal dari Ricky Gunawan.





PASAR KAYU MERBAU

© EIA/Telapak

Pasar internasional merbau telah berubah belakangan ini dikarenakan faktor-faktor seperti resesi ekonomi, trend konsumen, peraturan perpajakan di China, peraturan ekspor kayu di Indonesia dan ketersediaan pasokan kayu. Meskipun adanya perubahan-perubahan ini, investigasi Telapak/EIA di tahun 2009 dan 2010 mengungkapkan bahwa di pasar-pasar kunci seperti China, India, AS dan Eropa, perdagangan masih terus tumbuh subur. Baik Amerika Serikat maupun Eropa memiliki kebijakan pelarangan impor kayu ilegal; amandemen peraturan Lacey Act di Amerika Serikat diberlakukan tahun 2008, sementara peraturan kayu Uni Eropa akan diberlakukan mulai tahun 2012. China terus mengimpor dalam jumlah besar kayu ilegal.

CHINA

Bulan Mei dan Juni 2009, investigator dari Telapak/EIA mengunjungi pasar kayu Furen di Shanghai, yang merupakan pusat perdagangan kayu utama China. Meskipun terjadi penurunan dalam keseluruhan ketersediaan kayu asal Indonesia (akibat meningkatnya harga bahan baku, menurunnya pasokan dan penegakan hukum yang lebih tegas di Indonesia), kayu merbau tetap merupakan komoditas perdagangan utama asal Indonesia di pasar tersebut.

Telapak/EIA melihat antrian kontainer merbau asal Indonesia sedang dibongkar di gudang. Sebagian besar tampak seperti bahan lantai kayu setengah jadi, yang masih diijinkan untuk diekspor menurut perundang-undangan di Indonesia, namun terdapat sejumlah besar kayu gergajian dan balok kayu merbau yang diselundupkan keluar Indonesia. Salah seorang pedagang di sana memperkirakan lebih dari 80 persen merbau asal Indonesia yang tiba di Furen dalam bentuk kayu gergajian dan balok, serta kurang dari 20 persen merupakan "flooring blank". Sebagian besar bahan-bahan ini dipasok ke pabrik-pabrik di sekitar Shanghai dan Nanxun, pusat penghasil lantai kayu utama yang terletak di provinsi tetangga, yaitu Zhejiang.

Sebelumnya, di tahun 2005 sejumlah besar lantai kayu merbau buatan China diekspor ke Eropa dan AS. Menjelang tahun 2009 lantai kayu merbau banyak dijual ke pasar domestik karena meningkatnya kesejahteraan konsumen China dan resesi ekonomi yang melanda Eropa dan AS. Hal ini juga merupakan konsekuensi dari penerapan pajak ekspor sebesar 10 persen atas ekspor lantai kayu solid yang diperkenalkan tahun 2006.

Meskipun bahan lantai kayu yang teramati di pabrik-pabrik yang dikunjungi Telapak/EIA tahun 2009 umumnya sudah memenuhi persyaratan ekspor Indonesia, ada perusahaan-perusahaan yang terang-terangan mengambil bahan dari sumber yang ilegal. Salah satu dari perusahaan-perusahaan ini adalah Cheerson Flooring di Nanxun. Manajer bagian ekspor perusahaan tersebut menyatakan bahwa mereka mengimpor secara teratur kayu merbau dan kemas gergajian kasar yang telah dikeringkan langsung dari Indonesia. Di gudang perusahaan, investigator Telapak/EIA ditunjukkan tumpukan kayu gergajian kasar yang sedang menunggu pemrosesan. Ekspor seperti itu adalah ilegal berdasarkan aturan di Indonesia.

Selama kunjungan ke Haoweifu Wood, sebuah pabrik yang utamanya menghasilkan lantai kayu merbau dan kemas, pemilik pabrik mengungkapkan kepada investigator Telapak/EIA bahwa ia mengambil merbau lewat seorang agen asal China di Papua, yang mendapatkan kayu dari sumber yang "tidak sah". Ia mengatakan: "Mereka menebang dan menjualnya ke orang Cina. Lalu, orang-orang Cina ini mencari jalan untuk mengirimkannya ke China. Begitu sampai di China, kayu-kayu ini menjadi legal. Padahal, sebelumnya seluruhnya adalah ilegal." Ia juga mengungkapkan bahwa dokumen legalitas kayu yang ia dapatkan "dibeli dari dari pejabat pemerintah yang korup." Ia menekankan bahwa memiliki kontak yang tepat sangat penting untuk mengamankan kayu dan dokumen.

Seperti halnya lantai kayu, terdapat sebuah pasar besar kayu gergajian dan balok kayu



© EIA/Telapak

PALING ATAS:

Balok kayu merbau asal Indonesia seperti terlihat di Pasar Kayu Furen, Shanghai, bulan Mei 2009, merupakan pemandangan biasa dan bukti terus berlangsungnya penyelundupan dari Indonesia.

ATAS:

Pasar Furen, dekat Shanghai, pasar kayu terbesar China.

merbau di China. Kayu-kayu ini utamanya digunakan untuk pintu, tiang pintu, kusen jendela, tangga dan komponen furnitur. Sebagian besar produk dijual di dalam negeri. Sebagian besar kayu gergajian dan balok kayu asal Indonesia yang teramati di pasar Furen melanggar aturan ekspor di Indonesia.

Ketika investigator dari Telapak/EIA mengunjungi Senao Timber, balok-balok besar merbau dipajang secara terbuka. Sang pemilik mengatakan ia membeli dari pedagang Singapura namun mengakui bahwa kayu-kayu tersebut digergaji dan dikemas dalam kontainer di Surabaya, Indonesia, sebelum diekspor ke China. Shanghai Fenghua Wood adalah salah satu perusahaan yang mengimpor kayu gergajian dan balok kayu asal Indonesia, termasuk merbau dan kempas. Pemilik perusahaan mengatakan bahwa ia mengambil kayu merbau dari pemasok di Malaysia Timur. Ia menambahkan bahwa kayu tersebut “berasal dari Indonesia...namun karena Indonesia tidak boleh mengekspor balok kayu, kayu tersebut dibawa dari Indonesia ke Malaysia...kayu bulat tersebut digergaji di Malaysia, setelah itu baru diekspor ke China.”

Perusahaan perdagangan dan pengolahan kayu swasta bukanlah satu-satunya yang mengimpor merbau ilegal dari Indonesia – salah satu tujuan pengiriman kayu bulat merbau yang ditahan di Jakarta bulan Oktober 2009 adalah konglomerasi BUMN China bernama Jiangsu Skyrun International Group.

INDIA

Salah satu pasar merbau asal Indonesia yang terus berkembang adalah India. Tahun 2006, EIA bertemu dengan Pangeran Elavarasan dari perusahaan Singapura bernama SPB Cons Marine Import-Export yang mengekspor sejumlah besar balok dan kayu bulat merbau dan bengkirai ke India. Ia mengungkapkan bahwa kayu bulat merbau tersebut diselundupkan secara sistematis dengan tongkang dari Papua ke Kuantan di Malaysia lewat Kalimantan. Di India, merbau

digunakan terutama untuk pintu dan kusen jendela, sementara bengkirai digunakan untuk truck flooring.

Sebagian dari pengiriman 23 kontainer kayu bulat merbau yang ditahan tahun 2009 ditujukan untuk perusahaan di kota Kolkata yang bernama Sri Balaji Logs Products. Informasi yang tidak valid dari pedagang-pedagang lain mengatakan bahwa India hanya mengambil bahan baku dalam bentuk kayu bulat dan balok kayu, dan bukan produk setengah jadi atau produk jadi.

EROPA DAN AMERIKA SERIKAT

Uni Eropa dan Amerika Serikat dari dulu telah menjadi pembeli utama produk-produk kayu merbau, terutama untuk keperluan lantai kayu dan decking, yang dihasilkan Indonesia dan China. Sejak resesi ekonomi tahun 2007, pabrik-pabrik telah mengalami penurunan ekspor yang drastis ke pasar-pasar ini.

Tahun 2009 Telapak/EIA menemui pemasok besar dari Singapura, yang memiliki pabrik penghasil produk decking merbau dan bengkirai di Surabaya. Ia mengatakan bahwa ekspor ke negara-negara Eropa seperti Belgia, Belanda dan Jerman mengalami penurunan sebesar 70 persen akibat resesi.

Situasi serupa juga terjadi di China di mana pabrik-pabrik mengalami penurunan pesanan dari Eropa dan Amerika Serikat. Karenanya banyak perusahaan mengalihkan perhatian mereka pada penjualan domestik atau sama sekali meninggalkan kayu merbau sebagai bahan baku.

Meskipun terjadi penurunan ekonomi, namun beberapa perusahaan manufaktur China terus mengekspor lantai kayu dari merbau asal Indonesia kepada pengecer dan distributor di Eropa dan Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk Shanghai Lingge Flooring, melakukan ekspor ke Amerika Serikat, dan Haoweifu Wood, yang menghasilkan sekitar 10.000 meter persegi lantai kayu merbau per bulannya dan mengekspor produknya terutama ke Amerika Serikat dan Perancis.

KIRI BAWAH:

Para pekerja di Cheerson Flooring, Nanxun, Mei 2010.

KANAN BAWAH:

Sebagian besar balok kayu asal Indonesia yang dijual di Furen digunakan untuk membuat tangga kayu dan pintu



REKOMENDASI

Pemerintah Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam pemberantasan pembalakan liar sejak tahun 2005. Meskipun jumlah kayu ilegal yang mengalir keluar dari Indonesia selama paruh pertama dekade ini telah menurun, namun penegakan hukum yang efektif atas pihak yang bertanggung jawab, yaitu pihak pemberi dana, pemimpin perusahaan dan pejabat korup, masih amat memprihatinkan. Tidaklah mengherankan jika Presiden Indonesia telah memerintahkan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum untuk meneliti kasus-kasus pembalakan liar. Satgas tersebut perlu memfokuskan perhatian pada dua nama penyelundup merbau yang disebutkan dalam laporan ini, yaitu Ricky Gunawan dan Hengky Gosal.

Pembalakan liar dan perdagangan ilegal kayu merbau di Indonesia adalah tanda-tanda kegagalan yang meluas dalam penegakan hukum dan tata kelola di sektor kehutanan secara keseluruhan. Dari carut-marut pengelolaan hutan alam yang amat berharga di Papua sampai kegagalan lembaga-lembaga seperti badan inspeksi milik negara Sucofindo dan Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) untuk mencegah pelanggaran larangan pembalakan dan kayu gergajian, jelas terlihat adanya kebutuhan akan sistem pengawasan yang lebih efektif jika tindakan pemberantasan pembalakan liar hendak ditingkatkan.

Untungnya, peluang untuk menyusun sistem-sistem yang sesuai untuk mencapai tujuan ini sudah tersedia dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang baru. Peraturan Kementerian Kehutanan memiliki potensi – jika diimplementasikan secara penuh – untuk mewujudkan transparansi dan regulasi yang selayaknya pada sektor kehutanan Indonesia yang korup dan penuh ketidakjelasan.

PEMERINTAH INDONESIA PERLU:

- Mencantumkan merbau dalam Apendiks III Konvensi Perdagangan Internasional Spesies yang Terancam (CITES) dengan sebuah kuota perdagangan yang berkelanjutan.
- Melakukan penyelidikan formal terhadap aktifitas ilegal Ricky Gunawan dan Hengky Gosal.
- Menjelaskan status hukum dan implementasi pengawasan terhadap pengiriman kayu dari Papua.
- Memastikan bahwa Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) diterapkan secara penuh, termasuk penerapan sanksi pada lembaga sertifikasi yang gagal melakukan fungsinya dengan efektif.
- Memastikan bahwa Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) mensyaratkan penelusuran asal-usul kayu secara lengkap hingga ke sumber legalnya.
- Meninjau kembali posisi Sucofindo sebagai satu-satunya badan inspeksi ekspor kayu yang resmi.
- Meninjau kembali efektifitas Instruksi Presiden No. 4 tahun 2005 mengingat adanya bukti-bukti bahwa lembaga-lembaga penegakan hukum gagal menjalin kerja sama secara efektif untuk memberantas pembalakan liar.
- Memberdayakan satgas yang bertanggung jawab langsung ke Presiden untuk upaya pemberantasan pembalakan liar.

REFERENSI

1. Telapak/EIA, The Last Frontier, 2005
2. Telapak/EIA, The Thousand-Headed Snake, 2007
3. Human Rights Watch, Wild Money, 2009
4. Lawson et al, Illegal Logging and Related Trade, Chatham House 2010
5. Letter of Intent between Norway and Indonesia, Cooperation on Reducing Greenhouse Gas Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Mei 2010
6. Indonesia Corruption Watch, Corruption within illegal logging eradication, 2009
7. Sekretariat Negara Republik Indonesia, Sambutan Presiden RI pada Sidang Kabinet Paripurna, 5 April 2010., http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=4434
8. Antara, President: Mafia Behind Illegal Logging Cases, 7 April 2010
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 tahun 2005
10. Telapak/EIA, Up for Grabs, 2009
11. Jakarta Globe, SBY Calls for Developed Countries to Help Indonesia in Battle Against Global Warming
12. Suara Pembaruan, Penebangan Liar Marak Selama Reformasi, 25% Hutan Papua Hilang, 29 April 2010
13. Telapak/EIA, Up for Grabs, 2009
14. Kompas, Military Police Personnel Suspected Involved in Illegal Logging, 18 Maret 2005
15. Telapak, Bencana dan harapan, Maret 2010
16. Suara Pembaruan, Stop Log Exports from Mamberamo, 16 Nopember 2009
17. Tabloid Jubi, Ribuan Log Ilegal Ditemukan di Mamberamo, 8 Juni 2010
18. Tempo, Pengiriman Ribuan Kubik Kayu Ilegal Dari Papua ke Jawa Digagalkan, 21 Juni 2010
19. Tempo, 9 Juni 2010
20. Peraturan Bersama Gubernur Provinsi Papua dan Gubernur Provinsi Papua Barat, 18 September 2007
21. www.bpphp17.web.id/database
22. www.depht.go.id/files/databarelease_bpk08_0.pdf
23. Keputusan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/5/2008
24. Agro Indonesia, Laporan Surveyor sang Penentu, 27 Oktober 2009
25. Tempo, Kasus Penyelundupan Kayu 23 Kontainer Mulai Disidangkan, 8 Februari 2010
26. Berita Kota Makassar, Jual 23 Kontainer Kayu, Divonis Dua Tahun, 25 Juni
27. Tanjung Perak customs office press release, 11 Juni 2010
28. Surabaya Post, 21 Juni 2010
29. Telapak/EIA, A Backwards Step, 2009
30. Surabaya Pagi, Dua Pejabat Bea Cukai Perak Berseberangan, 23 Februari 2010

ENVIRONMENTAL INVESTIGATION AGENCY (EIA)

62/63 Upper Street
London N1 0NY, UK
Tel: +44 (0) 20 7354 7960
Fax: +44 (0) 20 7354 7961
email: ukinfo@eia-international.org

www.eia-international.org



EIA US

P.O.Box 53343
Washington DC 20009 USA
Tel: +1 202 483 6621
Fax: +202 986 8626
email: usinfo@eia-international.org

TELAPAK

Gedung Alumni IPB,
Jl. Pajajaran No. 54, Bogor 16143,
INDONESIA
Tel: +62 251 8393 245
Fax: +62 251 8393 246

www.telapak.org

